

**MENGUNGKAP PERAN AWIG-AWIG SEBAGAI MEKANISME  
PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS ADAT DALAM MENGELOLA  
KREDIT BERMASALAH DI LPD DESA PAKRAMAN BUAYANG**

**Oleh**

**Ni Kadek Diah Trisna Anggreni, NIM.2117051181**

**Jurusan Ekonomi dan Akuntansi**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran awig-awig sebagai mekanisme pengendalian internal berbasis adat dalam mengelola kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pakraman Buayang. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang beroperasi dalam kerangka nilai dan norma adat setempat. Keunikan sistem ini terletak pada integrasi antara prosedur formal pengelolaan keuangan dan kontrol sosial berbasis hukum adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa awig-awig berfungsi tidak hanya sebagai norma adat, tetapi juga sebagai perangkat kontrol sosial yang efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam proses pemberian maupun penagihan kredit, prajuru adat memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi sosial dan moral, memperkuat efektivitas tindakan yang dilakukan oleh LPD. Selain itu, sanksi sosial yang diatur dalam awig-awig, seperti pengucilan dan pembatasan hak dalam kegiatan adat, terbukti lebih ampuh dibandingkan sanksi administratif dalam menciptakan efek jera.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa awig-awig merupakan instrumen kontrol internal yang berbasis nilai komunal, mengedepankan prinsip tanggung jawab kolektif, dan memiliki kekuatan normatif yang tinggi. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait perubahan sosial dan generasi, serta belum adanya sistem dokumentasi digital yang sistematis. Oleh karena itu, pembaruan dan sosialisasi awig-awig menjadi upaya strategis untuk menjaga relevansinya di masa depan.

Kata Kunci: Awig-Awig, LPD, Kredit Bermasalah, Pengendalian Internal, Hukum Adat

**UNCOVERING THE ROLE OF AWIG-AWIG AS A CUSTOMARY-BASED INTERNAL CONTROL MECHANISM IN MANAGING NON-PERFORMING LOANS AT THE VILLAGE CREDIT INSTITUTION (LPD) OF DESA PAKRAMAN BUAYANG**

By

**Ni Kadek Diah Trisna Anggreni, NIM.2117051181**

**Department of Economics and Accounting**

**ABSTRACT**

*This study aims to reveal the role of awig-awig (customary law) as a traditional-based internal control mechanism in managing non-performing loans at the Village Credit Institution (LPD) of Desa Pakraman Buayang. LPDs are financial institutions owned by traditional villages, operating within a framework of local customary norms and values. The uniqueness of this system lies in the integration between formal financial management procedures and social control rooted in indigenous legal systems. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observation, and document analysis.*

*The results show that awig-awig serves not only as a set of customary norms but also as an effective social control tool for detecting, preventing, and resolving non-performing loans. In both the credit disbursement and repayment processes, traditional village leaders (prajuru) play a significant role in providing social and moral legitimacy, thereby enhancing the effectiveness of LPD's actions. Moreover, the social sanctions regulated in awig-awig, such as social exclusion and restriction from participating in traditional ceremonies, have proven to be more effective than administrative penalties in creating deterrent effects.*

*The study concludes that awig-awig functions as a community-based internal control system grounded in collective responsibility and strong normative power. However, challenges remain, particularly in terms of generational shifts and the absence of a systematic digital documentation system. Therefore, updating and promoting awig-awig through education and integration with digital tools are strategic steps to maintain its relevance in the future.*

*Keywords:* Awig-Awig, Village Credit Institution, Non-Performing Loan, Internal Control, Customary Law